

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Teori S-O-R (*Stimulus, Organism, Response*) merupakan teori yang berasal dari psikologi. Psikologi dan komunikasi memiliki kesamaan dalam objek materialnya yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi. Berdasarkan teori ini, penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang atau *stimulus* yang berkomunikasi dengan organisme (Effendy, 2003:255).

Teori S-O-R terdiri dari stimuli yang diterima oleh sebuah organisme, organisme merupakan komunikan yang mendapatkan stimuli lalu memberikan respon terhadap stimuli tersebut. Stimuli dalam penelitian ini adalah pengaruh terpaan yang diterima oleh organisme yang merupakan masyarakat Surabaya, sedangkan respon yang akan diteliti adalah pengaruh terpaan pemberitaan di media massa terhadap citra.

Komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu tetapi cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan; dan citra inilah yang mempengaruhi cara kita berperilaku. Media massa bekerja untuk menyampaikan informasi. Informasi tersebut dapat membentuk, mempertahankan atau mendefinisikan citra (Roberts dalam Rakhmat, 2012: 221-222). Media seringkali menampilkan realitas yang sudah diseleksi yang berarti media massa dapat mempengaruhi pembentukan citra tentang lingkungan sosial yang timpang, bias, dan tidak cermat sehingga dapat menghasilkan suatu stereotip.

Terpaan media berusaha mencari data khalayak tentang media baik jenis media, frekuensi maupun durasi penggunaan (Ardianto dan Erdinaya dalam Novianto, 2016: 835). Jenis media dapat dilihat dari bagaimana khalayak mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media *online* sebagai jenis media. Frekuensi adalah berapa kali seseorang mengonsumsi media untuk mendapatkan informasi. Sedangkan durasi digunakan untuk melakukan penghitungan berapa lama khalayak bergabung dengan suatu media. Atensi atau *Attention* adalah keadaan ketika rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah (Rakhmat, 2012:51). Adanya terpaan media secara terus menerus, dapat menimbulkan persepsi dan citra politik khalayak yang juga tidak sesuai dengan realitas sesungguhnya (Arifin, 2014:26).

Citra merupakan kesan, perasaan dan gambaran publik terhadap suatu organisasi atau perusahaan, sehingga citra positif perlu diciptakan dengan sengaja dan dipelihara sepanjang organisasi atau partai itu ingin tetap eksis ditengah-tengah publiknya (Arifin dalam Muchtar, 2016:139-140). Citra politik memiliki makna walaupun tidak selamanya selaras dengan realitas politik yang sebenarnya. Citra politik tersusun melalui persepsi yang bermakna tentang fenomena politik dan kemudian menyatakan makna itu melalui kepercayaan, nilai, dan pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi opini publik atau pendapat umum (Arifin, 2014:23).

Pengaruh dari media massa dapat membentuk citra dan dapat mempengaruhi masyarakat terhadap citra tersebut. Salah satunya melalui pemberitaan mengenai Partai Golkar yang tetap mencalonkan bakal caleg mantan napi korupsi walaupun pada saat itu bawaslu telah mengeluarkan peraturan yang melarang mantan napi korupsi untuk dicalonkan.

Pemberitaan ini muncul pertama kali pada bulan Juli 2018 dan dimuat oleh beberapa media *online* seperti Merdeka.com dan BBC Indonesia.

Menurut media *online* Merdeka.com, hampir setiap partai memiliki caleg bekas terpidana korupsi dan partai Gerindra berada di urutan pertama dengan 27 orang, dan diikuti oleh Golkar dengan 25 orang mantan napi korupsi. Selain itu ada partai NasDem dengan 17 orang, Partai Berkarya dengan 16 orang dan Hanura dengan 15 orang serta beberapa partai lainnya. Total caleg yang dicalonkan sejumlah 199 orang, Jumlah caleg tersebut merupakan total dari caleg yang akan melakukan kontestasi dalam tingkat DPRD maupun DPD. Hal ini sangat disayangkan oleh bawaslu yang sudah membuat fakta integritas dan sudah ditandatangani oleh partai-partai tersebut. Fakta integritas ini berisi tentang dukungan terhadap klausul untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi sebagai bacaleg.

Media *online* Tempo.co pada tanggal 17 Juli memuat berita serupa dengan judul “Golkar Daftarkan Caleg Mantan Napi Korupsi”. Pemberitaan tersebut menyebutkan bahwa partai Golkar telah menyeleksi para kandidat yang akan menjadi calon legislatif dan Partai Golkar menyetujui Nurlif dan Iqbal Wibisono untuk maju karena keduanya merupakan pimpinan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Golkar di daerahnya. Padahal keduanya merupakan mantan napi korupsi. T.M Nurlif dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan karena terbukti terlibat dalam perkara suap pemenangan Miranda Gultom sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Sedangkan Iqbal Wibisono dijatuhi hukuman penjara 1 tahun karena terbukti terlibat dalam korupsi dana bantuan sosial Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Wonosobo Selain itu Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 memberikan kesempatan kepada mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri. Kedua orang tersebut juga menggugat peraturan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi dicalonkan sebagai anggota legislatif ke mahkamah agung.

Media *online* BBC News Indonesia memberitakan “Berbagai Parpol ‘Tetap Nekad’ Usung Bakal Caleg Mantan Napi Korupsi ke KPU” yang muncul pada tanggal 18 Juli. Dalam pemberitaan tersebut Partai Golkar membenarkan bahwa mendaftarkan caleg yang kebetulan pernah terjerat kasus Korupsi. Partai Golkar tidak menyebutkan nama-nama mantan napi korupsi yang didaftarkan tetapi membenarkan juga bahwa ada sosok eks-napi korupsi yang dicalonkan di tingkat DPRD tingkat provinsi dan/kabupaten kota. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa-Sumatera-Bali DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, mengemukakan bahwa jika yang bersangkutan tidak memenuhi syarat berkaitan dengan Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 yang menolak mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif, masih ada satu mekanisme lagi yaitu banding atau Bawaslu.

Pada tanggal 19 Juli 2018, terdapat berita 38 caleg mantan napi korupsi maju di pileg 2019. Kompas TV dalam acara Kompas Petang mengungkapkan bahwa calon legislatif yang berada di tingkat DPRD RI tidak ada yang mantan napi korupsi sedangkan di tingkat DPRD Provinsi maupun tingkat DPRD Kabupaten/Kota ada total 38 orang dengan pembagian 12 caleg di tingkat DPRD Provinsi dan 26 Caleg di tingkat kabupaten atau kota. Selain itu diketahui juga bahwa Partai Golkar mencalonkan calon legislatif mantan napi korupsi di tingkat DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 3 orang dan diungguli oleh Demokrat dengan 4 orang.

Media *online* Kompas juga memuat pemberitaan serupa pada tanggal 21 September dengan judul “Ini Daftar 26 Caleg Eks Koruptor DPRD Kabupaten/Kota”. Dari pemberitaan ini diketahui beberapa nama caleg mantan narapidana korupsi yang maju di tingkat DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu ada sejumlah nama yang semula dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU lantaran statusnya sebagai mantan napi korupsi yang harus diloloskan sebagai caleg. Diantaranya adalah dari Partai Gerindra, Alhajad Syahyan, Ferizal, dan Mirhammuddin; Dari Partai PDIP Idrus Tadjji; Dari Partai Golkar, Heri Baelanu, Dede Widarso, dan Saiful T Lami; Dari Partai Nasdem, Abu bakar dan Edi Ansori; Dari Partai Garuda, Julius Dakhi dan Ariston Moho; Dari Partai Berkarya, Yohanes Marinus Kota dan Andi Muttamar Mattotorang; Dari PKS, Maksum DG Mannasa; Dari Partai Perindo, Zukifikri; Dari Partai Amanat Nasional, Masri, Muhammad Afrizal, dan Bahri Syamsu Arief; Dari Partai Hanura, Warsit dan Moh Nur Hasan; Dari Partai Demokrat, Jones Khan, Jhony Husban, Syamsudin, dan Darmawaty Dareho; Dari Partai PKP Indonesia, Matius Tungka dan Joni Cornelius Tondok.

Merdeka.com pada 16 September memuat berita “Golkar Akan Patuhi Putusan MA Soal Caleg Mantan Napi Korupsi” berita ini muncul setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa pencalonan napi mantan korupsi tidak menyalahi peraturan. Dalam pemberitaan tersebut, PLT ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng mengemukakan bahwa pencalonan mantan napi korupsi tidak menyalahi peraturan dan Partai Golkar menghormati keputusan Mahkamah Agung yang menggagalkan peraturan KPU yang melarang napi mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai caleg.

Walaupun adanya pemberitaan Partai Golkar mencalonkan mantan napi korupsi di media massa, berdasarkan survei Alvares pada bulan Agustus, elektabilitas Partai Golkar masih berada di nomor 3 yaitu dengan 7,8 persen dan diungguli oleh PDI-P dengan 26,1 persen dan Gerindra dengan 18,7 persen. Diketahui Partai Golkar sedang memperbaiki elektabilitasnya yang menurun pasca kasus Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi. Menjadi partai pendukung pemerintahan menjadi salah satu jalan keluar bagi Partai Golkar menurut ketua DPP partai Golkar, Ace Hasan Syadzily. Hasan juga mengatakan bahwa jika Golkar tidak mendukung pemerintah, maka bukan tidak mungkin elektabilitas partai bisa turun hingga 4%.

Pada penelitian ini citra yang ingin dilihat oleh penulis adalah citra politik. Citra politik berkaitan dengan sosialisasi politik dan terbentuk melalui pembelajaran politik seseorang baik secara langsung maupun melalui pengalaman empirik. Citra politik juga mencakup beberapa hal diantaranya seluruh pengetahuan politik seseorang, preferensi yang melekat dari peristiwa politik, dan pengharapan yang mungkin terjadi terhadap objek dalam situasi tersebut (Arifin dalam Muchtar, 2016:140).

Pada penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana pengaruh terpaan media terhadap citra. Penulis memilih masyarakat Surabaya sebagai subyek penelitian karena Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan penduduk sebanyak 2.599.796. Selain itu Partai Golkar menduduki peringkat empat dalam pendapatan kursi di DPRD Surabaya.

Penelitian sejenis tentang hubungan terpaan telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kemungkinan ada kesamaan dalam pendekatan penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, dan teknik

pengumpulan data. Tetapi penelitian ini dan penelitian terdahulu menggunakan objek dan subjek penelitian yang berbeda. Sehingga hasil penelitian ini akan berbeda dari penelitian terdahulu.

Pada penelitian ini, kriteria masyarakat Surabaya yang dijadikan responden adalah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, mengetahui pemberitaan di media massa serta memiliki umur 17 tahun keatas. Umur ini dipilih karena menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004, penduduk yang memiliki umur 17 tahun ke atas pada saat tanggal pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mempunyai hak pilih.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Amelia Adeline, Universitas Katolik Widya Mandala Fakultas Ilmu Komunikasi dengan judul *Pengaruh Pemberitaan “Ada Apa Dengan Pizza” di Majalah Tempo Edisi 5-11 September 2016 terhadap Corporate Image Pizza Hut*. Penelitian tersebut menghasilkan adanya hubungan yang signifikan antara *prominence* dan *the position* dengan pemberitaan “Ada Apa Dengan Pizza” di majalah Tempo edisi 5-11 September 2016 terhadap corporate image Pizza Hut. Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah obyek penelitian dan indikator obyek. Pada penelitian terdahulu, obyek penelitian merupakan hubungan pemberitaan dengan citra perusahaan sedangkan peneliti menggunakan hubungan terpaan dengan citra partai politik.

Penelitian terdahulu juga pernah dilakukan oleh Desy Sanada, Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Fakultas Ilmu Komunikasi dengan judul *Pengaruh Terpaan Pemberitaan Delay di Media Massa Terhadap Citra Lion Air Indonesia Pada Penumpang Angkutan Udara di Surabaya*. Penelitian tersebut menghasilkan adanya hubungan yang signifikan antara terpaan media dengan citra perusahaan Lion Air. Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian

terdahulu adalah subyek penelitiannya dimana pada penelitian terdahulu menggunakan penumpang angkutan udara di Surabaya sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan subjek masyarakat Surabaya. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek dan indikator dari objek penelitian yaitu terpaan media.

Penelitian terdahulu lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuliana, mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Fakultas Ilmu Komunikasi dengan judul “*Pengaruh Terpaan Pemberitaan Penghapusan Low Cost Carrier Terhadap Citra Air Asia Sebagai Jasa Penerbangan Low Cost Carrier Pada Pengguna Jasa Airlines Di Surabaya*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya hubungan signifikan antara terpaan media dengan citra perusahaan Air Asia pada pengguna *airlines* di Surabaya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah indikator citra yang digunakan dimana pada penelitian tersebut menggunakan indikator citra milik Vos yaitu *primary impression, familiarity, perception preference, dan position*. Selain itu subjek yang digunakan oleh penelitian tersebut merupakan pengguna *airlines* di Surabaya. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya milik Yuliana adalah indikator terpaan media yang digunakan yaitu frekuensi, durasi, atensi, dan jenis media.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini meneliti tentang partai politik sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang korporasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan citra politik dimana penelitian sebelumnya meneliti pengaruh terpaan pemberitaan terhadap citra organisasi maupun perusahaan. Indikator citra politik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan (kognitif), preferensi (afektif), dan pengharapan (konatif). Penelitian ini akan menggunakan metode survei. Penelitian

survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Silalahi,2012:293). Penulis menggunakan metode survei untuk memperoleh informasi dari sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi masyarakat Surabaya.

I.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh terpaan pemberitaan Partai Golkar terkait pendaftaran bakal caleg mantan korupsi terhadap citra Partai Golkar pada masyarakat Surabaya?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terpaan pemberitaan partai Golkar terkait pendaftaran bakal caleg mantan korupsi terhadap citra Partai Golkar.

I.4. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan penelitian yang terlalu luas, maka dibuat batasan masalah berdasarkan ruang lingkup penelitian. Batasan masalah ini ditujukan agar penelitian dibahas lebih fokus. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Objek penelitian adalah permasalahan yang diteliti sebuah penelitian yaitu terpaan pemberitaan Partai Golkar terkait pendaftaran bakal caleg korupsi dan citra Partai Golkar.

- b. Subjek penelitian adalah masyarakat Surabaya yang mengetahui atau pernah membaca pemberitaan pendaftaran bakal caleg mantan napi korupsi.
- c. Tempat penelitian berada di kota Surabaya, Jawa Timur.

I.5. Manfaat Penelitian

I.5.1. Manfaat Akademis

Denganadanya penelitian ini, diharapkan dapat menambahkan referensi sebagai penelitian riset dalam bidang konsentrasi *Public Relations* telebihnya terkait bidang *political public relations*serta sebagai referensi bahan penelitian lebih jauh untuk kedepanya, baik di bidang ilmu komunikasi ataupun bidang studi lainnya.

I.5.2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak Partai Golkar dalam memperbaiki citra politik maupun menganggapi pemberitaan mengenai informasi partai politik serta menambah wawasan bagi peneliti tentang citra politik khususnya tentang pengaruh pemberitaan.